

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KABUPATEN TRENGGALEK

The Implementation Of A Policy Of Killing The Provision Of Drinking Water And Sanitation Community Based (Pamsimas) In Trenggalek

Siti Chusniati¹

¹Magister Ilmu Administrasi Universitas Kadiri

Abstrak

Air merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, tetapi kenyataannya tetap bahwa tidak semua orang memiliki akses ke air bersih dan sehat memadai, sesuai dengan kebutuhannya. Masalah air dan sanitasi yang buruk di Indonesia menelurkan Program Pamsimas. Tujuan Program Pamsimas adalah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin di pedesaan dan pinggiran kota, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup sehat dengan membangun / menyediakan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan dapat diadopsi oleh orang-orang untuk mencapai MDGs sasaran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari dua rumusan masalah yang ditetapkan, maka didapat hasil, antara lain Implementasi Kebijakan Program Pamsimas di Kabupaten Trenggalek sudah berjalan sesuai dengan pedoman teknis dimana dalam pelaksanaannya sudah mengacu pada komponen program yaitu pemberdayaan masyarakat, pelayanan sanitasi, penyediaan sarana air minum, dan dukungan manajemen pelaksana program. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Program Pamsimas di Kabupaten Trenggalek antara lain adanya metode pemberdayaan yang melibatkan keberadaan masyarakat, memberikan inovasi dan menggugah kreativitas warga melalui kerja kelompok, kompromi *bottom up* dan *top down* serta komitmen di semua tingkat. Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan Program Pamsimas di Kabupaten Trenggalek antara lain kurangnya kerjasama, kondisi alam, serta kualitas sumberdaya air yang belum dimanfaatkan.

Kata Kunci: Implementasi; Pamsimas; Pelayanan Publik

Abstract

Water is a basic need for mankind, but the fact remains that not everyone has access to clean water and healthy adequately, in accordance with its needs. The issue of water and poor sanitation in Indonesia spawn Program Pamsimas. The goal of the Program is to improve the access of Pamsimas drinking water and sanitation for the poor in rural areas and suburbs, as well as enhancing the values and behaviors of healthy living by building/infrastructure and means of providing drinking water and sanitation sustainable community-based and can be adopted by people to achieve the MDGs targets. Based on the results of the study and discussion of the two issues that the formulation is specified, then the obtained results, among other Policy Implementation Program Pamsimas in Trenggalek already running in accordance with the technical guidelines which in practice already refers to the components of the program i.e., community empowerment, the Ministry of sanitation, drinking water supply, and support the management of the commissioning programme. Factors that support the success of the Program Pamsimas in the presence of, among others, Trenggalek Regency method involving the existence of community empowerment, providing innovation and creativity inspires the citizens through group work, compromise bottom up and top down and commitment at all levels. Factors that impede the success of Trenggalek Regency Pamsimas, among others, lack of cooperation, natural condition, as well as the quality of the water resources untapped.

Keywords: Implementation; Pamsimas; Public Services

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat terutama di wilayah maupun daerah tertentu memberikan bermacam-macam dampak dari pertumbuhan penduduk, misalnya semakin banyak permukiman padat penduduk akan menambah keseriusan lingkungan, terbatasnya lahan terbuka hijau

dan yang sangat serius adalah terhadap penurunan daya dukung lingkungan yang disebabkan perilaku manusia itu sendiri. Maka dari itu dampak yang ditimbulkan harus disikapi dan diamati dengan tepat, karena kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan dan menimbulkan perilaku yang negatif.

Perkembangan pembangunan wilayah maupun daerah yang begitu cepat akan mengakibatkan munculnya beberapa macam permasalahan yang ada, yakni masalah sanitasi lingkungan. Dimana masalah sanitasi, sangat bisa menimbulkan kerusakan pada fisik lingkungan serta mental sosial masyarakat oleh sebab itu kegiatan bersanitasi suatu usaha yang wajib dilakukan untuk menciptakan kesadaran keadaan yang dapat menghindarkan timbulnya gangguan dan penyakit. Salah satu cara sanitasi yakni dengan menjaga kebersihan dari segala unsur yang mempengaruhi kelestarian lingkungan dan yang paling tepat memungkinkan menghindarkan timbulnya gangguan dan penyakit.

Air sebagai kebutuhan utama kehidupan, seharusnya dapat terpenuhi secara kuantitas, kualitas, terjangkau dan kontinyu. Namun masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan air minum yang layak, terutama masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan dan pinggiran kota. Program Pamsimas adalah salah satu program andalan Pemerintah di dalam penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat perdesaan dan pinggiran kota melalui pendekatan berbasis masyarakat.

Berdasarkan laporan WHO-Unicef joint monitoring 2004 kinerja sektor Air Minum & Sanitasi di Indonesia dinilai masih rendah dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Hanya 50% dari seluruh penduduk Indonesia yang mendapatkan akses air minum (Susenas, 2002). Di area perdesaan angka ini bahkan lebih rendah yaitu hanya 41%. Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi yang rendah ini, berdampak pada kesehatan masyarakat, tingkat perekonomian dan kondisi lingkungan untuk mengatasi keterbatasan akses terhadap air minum dan sanitasi perlu pendekatan berbeda bagi masyarakat perdesaan yaitu sebagai upaya menjamin sustainability program, selain harus berbasis masyarakat agar program lebih efektif, maka pembangunan infrastruktur harus disertai upaya perubahan nilai dan perilaku hidup

bersih masyarakat. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan kerangka Kebijakan Nasional untuk Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan yang Berbasis Masyarakat, yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah sanitasi merupakan fenomena yang bisa dikatakan krusial dan memerlukan perhatian khusus dari berbagai banyak pihak, bukan hanya pihak yang terkait tetapi semua elemen yang berpengaruh dalam peningkatan akses sanitasi yang layak. Hal ini menjadi salah satu agenda khusus dalam memenuhi tujuan utama Millenium Development Goals (MDG's). Berdasarkan Laporan Pencapaian di Indonesia pada tahun 2010 akses sanitasi di wilayah perkotaan masih di angka 69,51% dari target yang akan dicapai pada tahun 2017.

Bergulirnya otonomi daerah sekaligus berlakunya Undang-Undang Nomer 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pembangunan sanitasi tidak hanya dilakukan pada Pemerintah Pusat saja, namun melainkan juga menjadi wewenang Pemerintah Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah sangat memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan akses sanitasi yang layak di masyarakat termasuk masyarakat di daerah wilayah perkotaan, salah satunya seperti halnya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan kebijakan program PAMSIMAS.

Kabupaten Trenggalek merupakan kota kecil di tepian laut selatan, yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Trenggalek adalah kota yang penghasil batuan marmer ataupun batuan-batuan pualam terbesar di Indonesia. Wilayah Trenggalek terletak di sebelah barat daya atau kurang lebih berjarak sekitar 180 Km dari ibukota Provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya.

Kebijakan sanitasi telah diimplementasikan di Kabupaten Trenggalek, salah satu kebijakan tersebut adalah program pembangunan sarana

sanitasi yang menunjang kesejahteraan masyarakat, sarana sanitasi yang dibangun oleh Dinas Kesehatan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek pada tahun 2014 yang mana program pembangunan sanitasi disebut (SANIMAS) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat terus berkembang sampai di tahun 2016 Kabupaten Trenggalek memulai kebijakan program sanitasi yang disebut PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Program PAMSIMAS dilaksanakan mulai Tahun 2008 namun di Kabupaten Trenggalek Program ini baru dilaksanakan tahun 2014. Pendekatan pada program ini melibatkan secara penuh masyarakat dalam perencanaan, pembangunan maupun pengawasan sarana Air minum dan sanitasi, baik dalam bentuk Bak Penampungan, perpipaan, broncaptering dan MCK++ (Mandi, Cuci, Kakus) maupun IPAL Komunal (Instalasi Pengelolaan Air Limbah).

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka rumusan persoalan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kabupaten Trenggalek?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang mendukung/menghambat implementasi kebijakan Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Trenggalek?

B. LANDASAN TEORITIS

2.1. Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik adalah terjemahan istilah "Public Policy". Kata "policy" adayang menerjemahkan menjadi "kebijakan" (Wibawa,1994; Darwin; dalam Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2008:4) dan ada juga yang menerjemahkan menjadi "kebijaksanaan" (Islamy, 2001; Wahab, 1990; dalam LAN,2008:4). Saat ini kecenderungan untuk "policy" diartikan dalam istilah "kebijakan" (LAN, 2008:4).

Pengertian kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa pendapat para ahli, antara lain sebagai berikut.

(1) Menurut Thomas R. Dye (LAN,2008:4-5), "Public policy is whatever the goverment choose to do or not to do" (Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka tentunya ada tujuannya, karena kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, ini merupakan kebijakan publik yang tentunya ada tujuannya.

(2) Menurut James E. Anderson (LAN,2008:5), "Public policies are those policies developed by governmental bodies and official" (Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

(3) Menurut David Easton (LAN,2008:5), "Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society" (Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat).

Berdasarkan pendapat - pendapat para ahli di atas mengenai pengertian kebijakan publik, maka dapat disimpulkan kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan tersebut diartikan baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mempunyai tujuan tertentu dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Terdapat beberapa definisi mengenai kebijakan publik, dimana masing-masing definisi memberikan penekanan serta pengertian dan pemahaman yang berbeda. Salah satu definisi mengenai kebijakan publik adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas Dye dalam Subarsono (2005, h.2) "Kebijakan publik adalah tindakan, pilihan pemangku kepentingan untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan". Sedangkan menurut Anderson

dalam Bherta (2009, h.11) mengemukakan "kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan organisasi pemerintah". Jadi kebijakan publik disini hanya dibuat oleh Pemerintah dan bukan swasta.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan, maka kebijakan publik dapat dikatakan ataupun disimpulkan dimana kebijakan publik merupakan: (1) keputusan bersama yang dibuat oleh pemilik pemerintah, (2) berorientasi didasari pada kepentingan publik dengan mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang ditimbulkan, (3) untuk sesuatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan yang dilakukan.

2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, yang pelaksana kebijakannya melalui aktivitas atau kegiatan pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kegiatan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik merupakan kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy maker untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran (Subarsono, 2010: 87).

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Gerindle (Agustino, 2008: 139) sebagai berikut:

"Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program tersebut tercapai."

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2002:3) yang menyatakan "metodologi kualitatif" sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Penelitian kualitatif harus mempertimbangkan metodologi kualitatif itu sendiri.

D. PEMBAHASAN

4.1. Implementasi Program Pamsimas di Kabupaten Trenggalek

Program Pamsimas ini merupakan program pemerintah yang bergerak di bidang air minum dan sanitasi masyarakat. Program Pamsimas yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia ini didasarkan pada fakta masih minimnya akses air minum dan sarana sanitasi yang memadai di Indonesia yang berdampak pada kondisi sanitasi yang buruk dan meningkatnya penyakit berbasis lingkungan. Sebagai program stimulan dengan pendekatan berbasis masyarakat, program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan sekaligus sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Hal ini sesuai dengan maksud dari kebijakan publik yang diungkapkan oleh Widodo (2012), dimana kebijakan publik dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan, maksud dan tujuan kebijakan publik dibuat adalah untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam

rangka pencapaian target Universal Access 2019 melalui pengarusutamaan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

Program Pamsimas di Kabupaten Trenggalek telah dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Teknis yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebelum Program Pamsimas di Kabupaten dilaksanakan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi. Kabupaten Trenggalek pada tahun 2014 melakukan sosialisasi tingkat Kabupaten dengan dihadiri 35 desa dan setelah melalui tahapan seleksi desa didapatkan 10 desa sasaran dengan komposisi, 8 desa dari sumber Dana APBN dan 2 desa dari sumber Dana APBD. Sedangkan pada Tahun 2015 pada waktu sosialisasi Tingkat Kabupaten dihadiri oleh 25 desa yang pada waktu tahun 2014 tidak lolos seleksi sebagai desa sasaran Pamsimas. Pada tahun 2015 juga mengalokasikan 10 desa sasaran dengan komposisi 8 desa bersumber Dana APBN dan 2 desa dari Dana APBD. Jadi total desa sampai akhir Program Pamsimas II untuk Kabupaten Trenggalek sebanyak 20 desa sasaran. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Edward (Jones diterjemahkan oleh Istanto : 1994 bahwa kebutuhan utama bagi keefektifan pelaksana kebijakan adalah bahwa mereka yang menerapkan keputusan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas dan jika hal ini tidak jelas maka para pelaksana akan kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan.

a. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam komponen pemberdayaan masyarakat diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan keberlanjutan pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat, termasuk pelatihan. Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, diharapkan masyarakat dan Pemerintah

Daerah mampu menjadi pelaku utama pembangunan, khususnya dalam pelaksanaan dan pengelolaan pasca program.

Hal ini sesuai dengan Rubin dalam Sumaryadi (2005) yang mengemukakan 5 prinsip dari konsep pemberdayaan yaitu : (1) pemberdayaan masyarakat memerlukan break event dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari organisasi bisnis, dimana dalam pemberdayaan keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan lainnya; (2) pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan; (3) dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik; (4) dalam hal implementasinya usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan baik yang berasal dari Pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya; (5) kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

b. Pelayanan Sanitasi

Pelaksanaan Pelayanan Sanitasi dilakukan dengan pendekatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yaitu merubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemecuan dengan cakupan wilayah kabupaten (district-wide). Pendekatan STBM dilaksanakan melalui proses pelebagaan 3 (tiga) strategi sanitasi total yang merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi yaitu: a) Peningkatan kebutuhan dan permintaan sanitasi; b) Peningkatan penyediaan sanitasi dan c) Penciptaan lingkungan yang kondusif. Dengan pelaksanaan tiga strategi secara konsisten diharapkan akses universal air minum dan sanitasi tahun 2019 yaitu 100 % akses sanitasi layak dapat dicapai.

Ketiga komponen sanitasi total tersebut menjadi landasan strategi pelaksanaan untuk pencapaian 5 (lima) pilar STBM yaitu: Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM-RT), Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT), dan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLRT). Terkait dengan penyediaan sarana sanitasi, sarana sanitasi yang dimaksud dalam komponen ini adalah sarana penunjang perubahan PHBS yang disediakan di sekolah dasar. Contoh sarana yang dapat dibangun dalam komponen ini yaitu jamban siswa dan tempat cuci tangan.

Pelaksanaan Pelayanan Sanitasi telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dilaksanakan dengan penuh komitmen bersama seluruh SKPD terkait, Camat & Kepala Puskesmas se-Kabupaten Trenggalek menuju Universal Akses tahun 2019.

c. Penyediaan Sarana Air Minum

Penyediaan Sarana Air Minum dilaksanakan dengan tujuan untuk menambah jumlah penerima manfaat akses layanan air minum layak dan pemanfaat sarana sanitasi sekolah untuk mendukung pencapaian akses universal air minum dan sanitasi tahun 2019. Penyediaan sarana air minum ini menyediakan bantuan pengembangan infrastruktur air minum untuk desa-desa yang mendapatkan bantuan Pamsimas dalam tiga pilihan kegiatan, yaitu pembangunan baru, perluasan dan peningkatan.

Kabupaten Trenggalek pada Program pamsimas II sudah mempunyai desa pasca pelaksanaan sebanyak 20 lokasi yang sampai saat ini berfungsi dengan baik. Monitoring dilakukan secara rutin dan dilakukan pelaporan setiap periode tiga bulan sekali melalui web.Pasmimas.org dan selalu dilakukan up date data. Selain keberfungsian juga dilakukan pembinaan terhadap kinerja BP-SPAMS demi keberlanjutan dan perkembangan sarana yang telah dibangun sehingga target akhirnya 100% penduduk desa sasaran akan

terlayani dalam hal akses air minum dan sanitasi baik di masyarakat maupun di sekolah Dasar atau setingkat Madrasah Ibtidaiyah.

d. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program

Dukungan manajemen pelaksanaan program untuk program Pamsimas dilaksanakan oleh pemerintah pusat, kelembagaan tingkat provinsi, kelambgaan tingkat Kabupaten/Kota dan Kelembagaan Tingkat Masyarakat dan Unit Pelaksanaan. Untuk tim pengelolaan tingkat pusat terdiri dari Tim Pengarah Koordinasi Program, Tim teknis Program dan Project Management Unit (PMU) Pusat. Adapun tingkat provinsi melibatkan institusi Tim Koordinasi Provinsi (TKP) tim pengelola tingkat Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota yang dikepalai oleh Bappedalibang dan anggotanya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan dinas terkait lainnya. Untuk struktur kelembagaan masyarakat dan unit pelaksana di tingkat desa/kelurahan berbeda dengan yang lainnya, unit utama di desa adalah Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LSM) dan satuan pelaksana kegiatan (Satlak).

4.2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program Pamsimas di Kabupaten Trenggalek

Dalam program Pamsimas ada faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program. Adapun faktor-faktor pendukungnya adalah:

1. Paradigma baru dalam pendekatan pelaksanaan program Pamsimas yaitu metode yang digunakan adalah metode pemberdayaan yang melibatkan keberadaan masyarakat, memberikan inovasi dan menggugah kreativitas warga melalui kerja kelompok.
2. Kompromi bottom up dan top down Penyebaran, sosialisasi dan implementasi pendekatan dalam Pamsimas merupakanparadigm baru. Dalam pelaksanaan kegiatan Pamsimas lebihkearah bottom up namun juga terkoordinasi secara to down (campur pemerintah daerah lebih didominasi oleh

peran masyarakat, namun terdapat juga proses kompromi antara bottom up dan top down). Semua Instansi terkait termasuk LSM dan Swata yang dikoordinir oleh Bupati, dan peran aktif masyarakat melalui pemicuan dan pemberdayaan, merupakan cara yang strategis dalam penyebaran, sosialisasi dan implementasi kegiatan STBM.

3. Komitmen di semua tingkat

Terdapat kesepakatan komitmen antara pemerintah, LSM, masyarakat, dan berbagai kalangan pejabat di daerah, mulai kabupaten hingga pedesaan, tingkat RW dan RT.

Walaupun Program Pamsimas di Kabupaten Trenggalek secara umum berhasil dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya dijumpai beberapa faktor yang sedikit menghambat pelaksanaan kegiatannya, faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Kurangnya kerjasama dan koordinasi secara baik dan kontinue, baik formal maupun informal, khususnya antara Pemerintah Daerah (lintas SKPD terkait) Tim Konsultan Pendamping, KKM, Satlak & Masyarakat selaku penerima program.
2. Kondisi alam Kabupaten Trenggalek yang merupakan wilayah daratan yang berbukit dan bergunung-gunung, dan ada juga yang tandus seringkali menjadi kendala dalam penyalurannya.
3. Kualitas sumberdaya air yang belum dimanfaatkan dengan baik serta adanya beberapa kawasan yang rawan bencana dapat menjadi kendala dalam pengembangan wilayah.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Implementasi Kebijakan Program Pamsimas di Kabupaten Trenggalek sudah berjalan sesuai dengan pedoman teknis yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimana dalam

pelaksanaannya sudah mengacu pada komponen program yaitu pemberdayaan masyarakat, pelayanan sanitasi, penyediaan sarana air minum, dan dukungan manajemen pelaksana program.

b. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan Program Pamsimas di Kabupaten Trenggalek antara lain :

Faktor-faktor yang mendukung:

- (1) Adanya metode pemberdayaan yang melibatkan keberadaan masyarakat, memberikan inovasi dan menggugah kreativitas warga melalui kerja kelompok.
- (2). Kompromi bottom up dan top down Semua Instansi terkait termasuk LSM dan Swata yang dikoordinir oleh Bupati, dan peran aktif masyarakat melalui pemicuan dan pemberdayaan, merupakan cara yang strategis dalam penyebaran, sosialisasi dan implementasi kegiatan STBM.

(3). Komitmen di semua tingkat

Terdapat kesepakatan komitmen antara pemerintah, LSM, masyarakat, dan berbagai kalangan pejabat di daerah, mulai kabupaten hingga pedesaan, tingkat RW dan RT.

Faktor-faktor yang menghambat:

- (1) Kurangnya kerjasama dan koordinasi secara baik dan kontinue, baik formal maupun informal, khususnya antara Pemerintah Daerah (lintas SKPD terkait) Tim Konsultan Pendamping, KKM, Satlak & Masyarakat selaku penerima program.
- (2) Kondisi alam Kabupaten Trenggalek yang merupakan wilayah daratan yang berbukit dan bergunung-gunung, dan ada juga yang tandus seringkali menjadi kendala dalam penyalurannya.
- (3) Kualitas sumberdaya air yang belum dimanfaatkan dengan baik serta adanya beberapa kawasan yang rawan bencana dapat menjadi kendala dalam pengembangan wilayah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditulis, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Program Pamsimas terbukti mampu memberdayakan masyarakat pinggiran kota dan perdesaan. Diharapkan program ini berlanjut terus dari tahun ke tahun dengan alokasi desa penerima yang berbeda.
- b. Diperlukan program penguatan kelembagaan terlebih dahulu agar bisa tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan.
- c. Pengelolaan Data/Informasi Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) Perdesaan Terpadu perlu ditingkatkan untuk memantau pelaksanaan dan pencapaian program, dan diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait perencanaan dan penganggaran program air minum dan sanitasi perdesaan.
- d. Agar terus melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) dan pembinaan kepada kelompok penerima bantuan Program Pamsimas untuk melihat sejauh mana perkembangan usaha dan kemandirian kelompok.
- e. Bagi pemerintah hendaknya bisa membuat kebijakan yang tidak berbau diskriminasi serta lebih menuju pada kesetaraan fasilitas dan sarana kesehatan terutama air untuk menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan.
- f. Bagi masyarakat hendaknya lebih berpartisipasi aktif terhadap pembangunan serta lebih cermat terhadap pengawasan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
- g. Bagi LSM, lembaga donor dan stakeholder lain agar bersedia membantu pemerintah dan masyarakat dalam

pembangunan kesehatan dan penyediaan sumber air.

F. REFERENSI

- Bherta, Wiguna Sinya. (2009) Collaborative Empoworment in Interregional Infrastructure Development. Magister.thesis, Institut Teknologi Bandung.
- Budihardjo, (2009) Penataan Ruang dan Pembangunan Perkotaan. Bandung, Alumni.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (1997a) Prinsip-prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta, Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2003b) Prinsip-prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta, Rineka Cipta.
- Subarsono, AG. (2005) Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Jakarta, Departemen Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah di Kawasan Industri. Jakarta, Kementrian Lingkungan Hidup.
- <http://keslingfkmunhas.blogspot.co.id/2010/05/program-pamsimas-penyediaan-air-minum.html>
- <http://fisip.unsoed.ac.id/content/implem-tasi-program-penyediaan-air-minum-dan-sanitasi-berbasis-masyarakat-pamsimas-di-desa->